

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan posisi geografis yang sangat strategis. Melalui Deklarasi Djuanda, 13 Desember 1957, Indonesia menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia (laut sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia) menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Indonesia sebagai negara kepulauan, telah diakui dunia internasional melalui konvensi hukum laut PBB ke tiga, *United Nation Convention on the Law of the Sea* 1982 (UNCLOS 1982), kemudian diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang - Undang No.17 Tahun 1985 (Lestari, 2013).

Indonesia sebagai negara kepulauan menyimpan banyak potensi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan data yang bersumber dari Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri, jumlah pulau di Indonesia mencapai 17.504 pulau. Provinsi yang paling banyak memiliki pulau antara lain Kepulauan Riau 2,408 pulau, Papua Barat 1,945 pulau, Maluku Utara 1.474 pulau, Maluku 1,422 pulau, Nusa Tenggara Timur 1,192 pulau, Kepulauan Bangka Belitung 950 pulau, Nusa Tenggara Barat 864 pulau, Sulawesi Tengah 750 pulau, Sulawesi Utara 668 pulau, Aceh 663 pulau, Sulawesi Tenggara 651 pulau, dan Papua 598 pulau (Abrahamsz, 2019).

**Tabel 1. 1 Luas Daerah dan Jumlah Pulau di Jawa Menurut Provinsi**

| <b>No.</b>   | <b>Provinsi</b>  | <b>Luas Daratan (Km2)</b> | <b>Luas Lautan (Km2)</b> | <b>Jumlah Pulau</b> |
|--------------|------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1            | Jawa Timur       | 47.799.75                 | 37.263.21                | 508                 |
| 2            | Jawa Tengah      | 32.800.69                 | 11.620.92                | 296                 |
| 3            | Jawa Barat       | 35.377.76                 | 10.528.64                | 131                 |
| 4            | DKI Jakarta      | 664.01                    | 2.927.33                 | 218                 |
| 5            | DI Yogyakarta    | 3.133.15                  | 1.542.79                 | 23                  |
| 6            | Banten           | 91.592.43                 | 8.040.47                 | 131                 |
| <b>Total</b> | <b>Indonesia</b> | <b>211.365,01</b>         | <b>71.920</b>            | <b>1.280</b>        |

Sumber : Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri

Berdasarkan visi dan misi RPJPN 2005-2025, maka masa depan Indonesia telah disepakati dan dirumuskan bersama yaitu dengan mengoptimalkan potensinya sebagai negara maritim. Melalui konsep satu kesatuan pulau yang saling terhubung (*interconnectivity*), pembangunan dapat dimulai dari darat sebagai satu kesatuan pulau per pulau yang saling menghubungkan secara terintegrasi dengan pulau-pulau di sekitarnya (Lasabuda, 2013).

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang terdiri dari gugusan pulau – pulau yang tersebar di berbagai daerah. Menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, setidaknya Jawa Timur mempunyai 508 pulau yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota. Sumenep merupakan Kabupaten dengan jumlah pulau terbanyak di Provinsi Jawa Timur yaitu sebanyak 128 pulau.

**Tabel 1. 2 Jumlah Pulau Menurut Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur**

| No.          | Kabupaten/Kota              | Jumlah Pulau             |
|--------------|-----------------------------|--------------------------|
|              | <i>Regency/Municipality</i> | <i>Number of Islands</i> |
| 1            | Sumenep                     | <b>123</b>               |
| 2            | Malang                      | 117                      |
| 3            | Jember                      | 81                       |
| 4            | Trenggalek                  | 51                       |
| 5            | Pacitan                     | 35                       |
| 6            | Banyuwangi                  | 34                       |
| 7            | Blitar                      | 30                       |
| 8            | Gresik                      | 13                       |
| 9            | Tulungagung                 | 13                       |
| 10           | Situbondo                   | 5                        |
| 11           | Sidoarjo                    | 4                        |
| 12           | Sampang                     | 1                        |
| 13           | Probolinggo                 | 1                        |
| <b>Total</b> | <b>Jumlah Pulau</b>         | <b>508</b>               |

*Sumber: BPS Jawa Timur 2020*

Lahan menjadi salah satu unsur utama dalam menunjang kelangsungan kehidupan sejak manusia pertama kali menempati bumi. Lahan berfungsi sebagai tempat manusia beraktivitas untuk mempertahankan eksistensi. Analisa kesesuaian dan daya dukung merupakan sebuah konsep dasar yang dikembangkan sebagai salah satu upaya untuk pengelolaan sumberdaya alam serta lingkungan yang dilakukan secara berkelanjutan. Pulau-pulau kecil merupakan salah satu daerah yang memiliki kekayaan serta keanekaragaman hayati yang dapat dimanfaatkan dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kawasan pulau – pulau kecil. Pembangunan dan pengembangan Kawasan pulau – pulau kecil harus dapat menyeimbangkan antara efektifitas pemanfaatan sumberdaya alam dan juga efektifitas dari sektor perekonomian masyarakat di pulau- pulau kecil. (Noor & Romadhon, 2020)

Kebijakan *National Urban Development Strategic (NUDS)*, memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. *National Urban Development Strategy (NUDS)*, adalah skenario dan strategi pengembangan kota berdasarkan sistem kota – kota nasional dan karakteristik (tipologi) wilayahnya sebagai basis perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman perkotaan nasional. Perkotaan atau Kawasan perkotaan adalah permukiman yang meliputi kota induk daerah pengaruh di luar batas administratifnya yang berupa daerah pinggiran sekitarnya/kawasan sub urban. Kawasan perkotaan mempunyai kegiatan utama dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, serta kegiatan ekonomi (Mahendra, 2023)

Pemanfaatan ruang perkotaan menjadi aspek penting dalam menetapkan arah perkembangan suatu kota. Arah perkembangan dapat dipicu dari berbagai faktor dan dimensi ilmu, baik ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Basis pembangunan berorientasi penduduk saat ini menjadikan pertimbangan dalam penyesuaian perkembangan kota mengikuti pertumbuhan penduduk yang dipicu oleh penetapan pemanfaatan ruang, seperti di gunakan di negara berkembang, sehingga orientasi pergerakan penduduk seperti perpindahan penduduk (urbanisasi). Berbagai bentuk urbanisasi yang terjadi di negara berkembang terutama pada kota yang kekurangan sumber daya cenderung tumbuh lebih cepat namun tidak teratur, memungkinkan adanya ketimpangan pada sebagian besar penduduk kota terutama yang bekerja pada sektor informal (Khairiah, 2023). Dengan kata lain, kebijakan pembangunan regional kita telah membentuk daerah-daerah nodal.

Daerah nodal adalah daerah dimana ekonomi ruangnya dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi, dan daerah perencanaan/administrasi berada di bawah administrasi tertentu seperti provinsi, kabupaten, atau kecamatan (Marwazi et al., 2023).

Fenomena terciptanya daerah nodal tidak hanya terjadi pada wilayah kota maupun pedesaan, tetapi juga terjadi pada wilayah pesisir yang didukung dengan infrastruktur yang lengkap dengan wilayah pesisir yang minim infrastruktur. Dimana biasanya pusat kegiatan ekonomi terjadi di wilayah pesisir dengan infrastruktur lengkap. Wilayah pesisir dengan infrastruktur lengkap inilah yang kemudian dijadikan sebagai pusat kegiatan ekonomi, sedangkan wilayah pesisir di sekitarnya sebagai daerah pendukung. Pembangunan ekonomi daerah memiliki implikasi penting dalam konteks pembangunan nasional. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, beberapa aspek menjadi krusial. Seperti pembangunan ekonomi daerah harus didasarkan pada karakteristik unik masing-masing wilayah. Setiap daerah memiliki kekhasan dalam hal sumber daya manusia, kelembagaan, dan material. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan harus bersifat kontekstual dan mempertimbangkan keunikan setiap wilayah (Alfrida, 2024)

Aglomerasi kegiatan ekonomi di wilayah pesisir yang lengkap infrastruktur terjadi di Jawa Timur. Menurut peta pembangunan Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa daerah yang berada di pesisir Laut Jawa sebagian besar termasuk daerah maju dan berkembang, seperti Surabaya, Gresik, Lamongan dan seterusnya. Sementara kawasan pesisir Jawa Timur Bagian Selatan atau daerah yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia sebagian besar termasuk daerah yang tertinggal seperti Kabupaten Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, dan Blitar.

Karakteristik wilayah pesisir selatan yang berbukit-bukit, gelombang tinggi dan infrastruktur yang tidak memadai merupakan salah satu penyebab rendahnya tingkat aksesibilitas wilayah dengan daerah lainnya. Akibatnya daerah pesisir Jawa Timur bagian selatan menjadi kurang menarik bagi investor untuk melakukan investasi di wilayah ini. Pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) sepanjang 634.11 Km yang dibangun sejak tahun 2006 menjadi langkah pemerintah pusat dalam meningkatkan aksesibilitas wilayah selatan Provinsi Jawa Timur (Sukandar et al., 2016).

Kondisi ini juga terjadi di pulau Madura khususnya Kabupaten Sumenep, wilayah pesisir Kabupaten Sumenep di wilayah daratan menunjukkan aktivitas ekonomi yang relatif tinggi dibandingkan pesisir Kabupaten Sumenep wilayah kepulauan. Kondisi ini ditunjukkan dengan adanya kantong-kantong kemiskinan terbanyak di wilayah kepulauan Kabupaten Sumenep. Salah satu wilayah kepulauan Sumenep yang menjadi kantong-kantong kemiskinan adalah wilayah pesisir Kecamatan Sapeken.

Masyarakat pesisir atau kepulauan (nelayan, petani, atau pembudidaya) cenderung mengalami keterbelakangan secara ekonomi dan berbagai sektor lainnya. Mereka mengalami kemiskinan secara kultural dan juga secara struktural (Cristianawati, 2017). Sebagai daerah kepulauan dengan gugusan pulau-pulau kecil yang indah, Pulau Sapeken memiliki kekayaan alam berupa potensi sumber daya laut perikanan, rumput laut, sumber gas alam, hutan mangrove, mutiara, konservasi rusa dan penyu, pantai pasir putih, taman laut dengan ikan hias yang indah, terumbu karang yang masih bagus (belum rusak), pantai dengan pasirnya yang putih, konservasi rusa dan penyu.

[illegible]

Sumber: Sapeken dalam Angka 2019

Rendahnya aktivitas ekonomi masyarakat pesisir pulau Sapeken, selain disebabkan oleh karakteristik masyarakatnya juga disebabkan oleh infrastruktur yang kurang menunjang terhadap aktivitas ekonomi. Salah satu contoh yang paling nyata adalah infratruktur jalan, jalan yang menghubungkan antar desa di pesisir pulau Sapeken dihubungkan dengan kelas jalan jalan Kolektor Primer yang juga kondisinya tidak baik. Rendahnya tingkat aksesibilitas inilah yang kurang menarik bagi investor untuk melakukan investasi di wilayah ini, sehingga aktivitas ekonomi relatif tertinggal dibandingkan dengan pesisir di wilayah daratan. Padahal

jika dilihat dari potensinya wilayah pesisir pulau Sapeken tidak kalah dibandingkan dengan wilayah pesisir di wilayah daratan Kabupaten Sumenep.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang di atas maka penulis mengambil rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apa saja potensi komoditas di wilayah pesisir kecamatan Sapeken?
2. Bagaimana daya dukung lingkungan tiap-tiap wilayah pesisir Kecamatan Sapeken?
3. Bagaimana daya dukung komoditas tiap tiap wilayah pesisir Kecamatan Sapeken?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis potensi komoditas yang ada di wilayah pesisir kecamatan sapeken.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis daya dukung komoditas tiap-tiap wilayah pesisir Kecamatan Sapeken.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis daya dukung lingkungan tiap-tiap wilayah pesisir Kecamatan Sapeken.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **a) Manfaat Praktis**

- 1) Menjamin ketersediaan informasi potensi ekonomi wilayah pesisir Kecamatan Sapeken.

- 2) Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap potensi dan daya dukung wilayah pesisir Kecamatan Sapeken.
- 3) Dapat meningkatkan mutu dan kualitas pengembangan wilayah pesisir Kecamatan Sapeken.

**b) Manfaat Teoritis**

- 1) Dapat menjadi bahan rujukan pada sektor lingkungan hidup di Madura mengenai perkembangan Daya Dukung Lingkungan dan Fasilitas.
- 2) Sebagai penelitian lanjutan guna mengetahui daya dukung lingkungan dan arah pembangunan Fasilitas di kepulauan Madura.
- 3) Berkontribusi dalam teori pembangunan ekonomi.
- 4) Membantu penyediaan data yang diperlukan untuk perumusan rencana pembangunan jangka menengah daerah.